



Komitmen Indonesia dan Dukungan dari Organisasi Masyarakat Sipil

Disampaikan dalam Webinar Seri I Sanitation and Water for All (SWA) dan
Mutual Accountability Mechanism (MAM):
*Komitmen Pembangunan Air dan Sanitasi oleh Organisasi Masyarakat Sipil
di Indonesia*

Nur Aisyah Nasution

DIREKTORAT PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

SANITATION AND WATER FOR ALL (SWA) dan MEKANISME AKUNTABILITAS MUTUAL (MAM)



Sanitation and Water For All (SWA)



1

SWA adalah kemitraan global multi-stakeholders dari unsur pemerintah, donor, swasta, United Nations agencies, lembaga pendidikan tinggi dan riset, Civil Society Organizations (CSO), serta filantropi.

2

SWA merupakan platform global yang didirikan dalam rangka **pelaksanaan mandat SDGs Tujuan 6: Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua**, khususnya untuk pencapaian akses universal air minum, sanitasi, dan hygiene (Target 6.1 dan 6.2);

3

Fokus kemitraan SWA adalah untuk menginisiasi adanya dialog politik tingkat tinggi yang dipimpin oleh pemerintah sehingga **terjadi proses pengambilan kebijakan yang kolaboratif dan melibatkan berbagai pihak** mendapatkan prioritas tinggi dalam pembangunan negara baik dalam pendanaan, kelembagaan, dan tata kelola;

4

SWA telah menginisiasi penyelenggaraan pertemuan tingkat tinggi sejak tahun 2010 yang diselenggarakan setiap tahun secara bergantian di berbagai negara. Pertemuan rutin tersebut **ditujukan untuk memberikan advokasi melalui dialog antar negara yang dilakukan melalui SMM dan FMM.**



PERTEMUAN TINGKAT TINGGI SWA: FMM & SMM



FMM: Finance Ministers' Meeting

- Forum pertemuan antar Menteri Keuangan dunia untuk membangun dan meningkatkan peran, serta kerja sama Kementerian Keuangan dalam mengatasi gap pendanaan dan menciptakan investasi cerdas untuk mencapai akses universal air minum, sanitasi, dan hygiene.
- Pada tahun 2019, Indonesia telah menyampaikan komitmen dan *country overview* untuk Finance Ministers' Meeting (FMM) 2020.

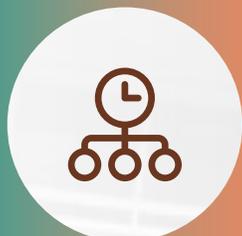


SMM: Sector Ministers' Meeting

- SMM adalah forum pertemuan **berbagai Menteri dunia yang menangani sektor air minum, sanitasi, dan hygiene**. Pelaksanaan SMM merupakan **peluang advokasi tingkat tinggi** untuk meningkatkan kepemimpinan politik di sektor WASH serta menjadi momen berbagi pengalaman bagi para menteri dalam **upaya menyelaraskan komitmen nasional**.
- SMM 2022 akan mengangkat tema "***Building Forward Better for Recovery and Resilience***" dengan Indonesia sebagai tuan rumah.

KETERLIBATAN DAN PERAN AKTIF INDONESIA DALAM SWA

START



2017

Bergabung dalam SWA: Menteri PPN/Kepala Bappenas hadir dan berpartisipasi aktif dalam High Level Meeting - SMM dan FMM 2017 di Washington D.C

Deputi Bidang Pengembangan Regional **hadir pada SMM 2019** di Costa Rica, mewakili Menteri PPN/Kepala Bappenas

2019

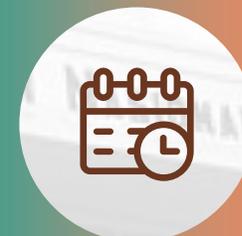


2020

Menteri PPN/Kepala Bappenas **hadir dan menyampaikan closing remarks pada FMM 2020** yang diadakan secara virtual pada 3 regional yaitu Africa, America Latin, dan Asia-Pasifik.

Indonesia mempersiapkan pelaksanaan SMM. Telah dilaksanakan **koordinasi antara SWA dan Menteri PPN/Kepala Bappenas**

2021



Output dari SMM 2019 untuk Indonesia ialah:

- Penentuan **Indonesia sebagai Host SMM 2022**
- Dukungan SWA dalam **memperkuat political will** dalam mendukung WASH dan pencapaian ODF sebagai prioritas nasional
- **Mekanisme Akuntabilitas Mutual (MAM)**



Apa itu Mekanisme Akuntabilitas Mutual (MAM)?



1

Proses dimana pemangku kepentingan dapat **dimintai pertanggungjawaban** oleh satu sama lain **atas komitmen yang dibuat.**

2

Bertujuan untuk **mencapai tujuan bersama** dan dilakukan dengan **membangun kepercayaan, kesepahaman, serta kolaborasi** antara para pemangku kepentingan.

3

Dalam **konteks SWA**, akuntabilitas mutual merupakan proses dimana para mitra secara bersama **membangun sistem akuntabilitas yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis dan terdapat timeline yang jelas (time-bound actions).**

4

Mekanisme bagi pemerintah dan para pemangku kepentingan lainnya untuk bersama-sama **membuat komitmen dalam mencapai target SDG 6.**

Pemerintah dan para pemangku kepentingan **berkolaborasi dalam menentukan komitmen MAM nasional.**

PERAN CSO & NGO DALAM PEMBANGUNAN AIR MINUM, SANITASI DAN HYGIENE (WASH)



Peran NGO (Non-Governmental Organization)

Peran NGO secara umum (William, 1991):

1. Pembangunan dan Pengoperasian Infrastruktur
2. Mendukung Inovasi, Demonstrasi dan Pilot Projects
3. Memfasilitasi Komunikasi
4. Bantuan Teknis dan Pelatihan
5. Riset, Monitoring, dan Evaluasi
6. Melakukan Advokasi dengan dan untuk masyarakat

Abstracted from - Cousins William, "Non-Governmental Initiatives" in ADB, *The Urban Poor and Basic Infrastructure Services in Asia and the Pacific*. Asian Development Bank, Manila, 1991

Peran NGO dalam sektor air dan sanitasi

1. **Fasilitasi pemberian layanan termasuk penyediaan layanan langsung** (khususnya dalam konteks bantuan darurat dan kemanusiaan atau di daerah yang ditandai dengan kemiskinan ekstrem atau keterpencilan geografis) atau memainkan peran perantara atau perantara antara masyarakat dan penyedia layanan.
2. **Pendidikan masyarakat, peningkatan kesadaran, sanitasi dan promosi kebersihan dan pemasaran** termasuk merangsang permintaan, pendekatan sensitif gender, penguatan rantai pasokan dan pelaksanaan program perubahan perilaku.
3. **Membangun kemitraan dan mempromosikan jaringan antara pelaku sektor yang berbeda** termasuk mewakili pandangan masyarakat kepada pemerintah dan penyedia layanan dan menerjemahkan dan mengkomunikasikan kebijakan dan peraturan nasional ke tingkat lokal.
4. **Peningkatan kapasitas untuk pemerintah daerah, penyedia layanan, kelompok masyarakat sipil dalam negeri dan pengguna akhir** (rumah tangga dan masyarakat).
5. **Penelitian dan inovasi termasuk demonstrasi dan uji coba** pendekatan dan teknologi yang inovatif dan diadaptasi secara lokal.
6. **Terlibat dalam dialog kebijakan** termasuk mempromosikan pendekatan dan teknologi yang telah terbukti, mengkomunikasikan pelajaran yang didapat, mengkomunikasikan kebutuhan masyarakat, mengadvokasi kesetaraan gender dan memantau efektivitas program dan inisiatif pemerintah.

(Carrad et al., 2009)

Peran CSO (Civil Society Organization)

Peran CSO secara umum (Cooper, 2018):

- 1 Penyedia layanan (misalnya, penyediaan layanan dasar)
- 2 Advokat/kampanye (misalnya, masalah lingkungan)
- 3 Pengawas kepatuhan pemerintah terhadap perjanjian hak asasi manusia
- 4 Membangun kewarganegaraan yang aktif
- 5 Berpartisipasi dalam proses tata kelola global

Helpdesk Report - Rachel Cooper, "What is Civil Society, its role and value in 2018?", UK Department for International Development and other Government departments, K4D. University of Birmingham. 2018.

Peran CSO dalam sektor air dan sanitasi

1. Kontribusi CSO untuk **menutup kesenjangan di sektor AMPL peri urban dan pedesaan**¹
2. **Pengelolaan sumber daya air dan pencegahan bencana** yang komprehensif¹
3. Membantu masyarakat untuk **menyuarakan keprihatinan dan melakukan advokasi** untuk meningkatkan kehidupan masyarakat.²
4. **Membawa pengetahuan unik dan teknologi baru** seperti solusi berbasis alam untuk masalah air, untuk membentuk kebijakan dan strategi, serta mengidentifikasi dan membangun solusi.³
5. Sebagai organisasi yang **mempromosikan cara alternatif pembiayaan WASH dan pengelolaan sumber daya air.**³
6. Pendukung solidaritas: **mempromosikan nilai-nilai** Hak Asasi Manusia untuk Akses Air Minum dan Sanitasi.³
7. Sebagai perwakilan dalam **memberi dukungan pada kelompok terpinggirkan** atau yang kurang terwakili³

¹ *The evolution of civil society organisations over the last two decades and their role in water and sanitation. Webinar. Sanitasi dan water for all. 2020*

² *Kemitraan Indonesia Australia untuk Infrastruktur (KIAT) Civil Society Engagement Grant Program*

³ *Wetlands International, 2017. WASH and Water Security. Integration and the role of civil society. Wetlands International, The Netherlands.*

Kekuatan CSO & NGO untuk Sektor WASH

Meningkatkan partisipasi dalam proses penganggaran di tingkat nasional dan daerah.

Mendorong terjadinya peningkatan alokasi anggaran untuk air dan sanitasi sejak partisipasi masyarakat dilakukan.

Peningkatan kapasitas CSO dalam partisipasi anggaran **memicu hasil lain:**

1. Peningkatan mobilisasi sumber daya
2. Peningkatan kapasitas CSO dan staf pemda di sektor terkait WASH
3. Peningkatan koordinasi dengan CSO lain
4. Peningkatan kerjasama dengan media

Peningkatan kapasitas aparat desa untuk akuntabilitas, transparansi, dan keterampilan manajemen



Kolaborasi Pemerintah dengan CSO memiliki potensi untuk berkontribusi terhadap SDGs yaitu:

Goal 3: Good health and well-being – Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages.

Goal 5: Gender equality – Achieve gender equality and empower all women and girls.

Goal 6: Clean water and sanitation – Ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all.

Goal 9: Industry, innovation and infrastructure – Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization, and foster innovation.

Goal 11: Sustainable cities and communities – Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable.

DRAFT KOMITMEN INDONESIA



DRAFT KOMITMEN DALAM MAM

#1



Meningkatkan komitmen politik dan investasi untuk mempercepat peningkatan WASH di Indonesia

Enhance political commitment and investments to accelerate scaling up inclusive WASH in Indonesia

#2



Memperkuat pemantauan dan pelaporan yang didorong oleh kesetaraan dan keterlibatan masyarakat

Strengthen equity driven monitoring and reporting and citizen's engagement

#3



Mengembangkan investasi dan infrastruktur sektor WASH yang berketahanan iklim

Developing climate-resilient WASH sector investment and infrastructure

#4



Memperluas kemitraan dan memobilisasi pembiayaan alternatif untuk meningkatkan layanan WASH

Expand partnerships and mobilize alternative financing to scale up WASH services

#1



Meningkatkan komitmen politik dan investasi untuk mempercepat peningkatan WASH di Indonesia

Sub-komitmen	Milestone (2022)	Target (2023)	Target 2030
Sub-komitmen 1: Pengesahan Roadmap Air Minum Aman, Sanitasi Aman, Stop BABS, dan CTPS oleh Pokja PPAS Nasional	1. Finalisasi Roadmap Air Minum Aman, Sanitasi Aman, Stop BABS, dan CTPS	a. Roadmap Air Minum Aman, Sanitasi Aman, Stop BABS, dan CTPS menjadi produk kebijakan nasional (Bappenas)	100% provinsi dan kabupaten/kota menuangkan target akses air minum aman, sanitasi aman, dan hygiene ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah
	2. Sosialisasi dan advokasi Roadmap Air Minum Aman, Sanitasi Aman, Stop BABS, dan CTPS bagi Pemda dan stakeholders lainnya	b. Seluruh rencana prioritas dan strategi setiap milestone dalam Roadmap diinternalisasi ke dalam Renja K/L 2024, RPJMN 2025-2029, dan Renstra K/L 2025-2029 (Bappenas dan KL terkait) c. STBM 5 Pilar (termasuk CTPS) menjadi target Renja K/L 2024, RPJMN 2025-2029 dan Renstra Kemenkes 2025-2029 (Kementerian Kesehatan)	
Sub-komitmen 2: Peningkatan alokasi pendanaan untuk air minum aman, sanitasi aman, dan hygiene	1. Komitmen seluruh K/L di sektor air minum, sanitasi dan hygiene untuk meningkatkan pendanaan	a. Alokasi pendanaan untuk air minum dan sanitasi aman serta hygiene dalam anggaran K/L terkait (Bappenas dan KL terkait)	a. Peningkatan alokasi pendanaan APBN untuk air minum aman, sanitasi aman, dan hygiene b. 100% Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota mengalokasikan pendanaan air minum dan sanitasi aman dalam APBD, termasuk untuk pemantauan dan evaluasi
	2. Advokasi dan koordinasi Pokja PPAS Nasional dan Daerah	b. Alokasi pendanaan untuk air minum dan sanitasi aman serta hygiene dalam APBD (Kemendagri dan pemerintah daerah)	
	3. Penyiapan costing tools untuk akses air minum aman, sanitasi aman dan hygiene	c. Air minum, sanitasi dan hygiene menjadi prioritas dan menu seluruh Dana Transfer (DAK, DAU, Dana Desa, DID, dll)	

#1



Meningkatkan komitmen politik dan investasi untuk mempercepat peningkatan WASH di Indonesia

Sub-komitmen	Milestone (2022)	Target (2023)	Target 2030
Sub-komitmen 3: Penguatan Mekanisme Koordinasi untuk WASH dalam Kedaruratan, WASH di sekolah, WASH di tempat kerja dan WASH di fasilitas kesehatan, dan WASH di tempat kerja dan WASH.	Dimulainya penyusunan kerangka WASH di sekolah, WASH fasilitas kesehatan dan WASH di di sekolah, WASH ditempat kerja fasilitas kesehatan, dan WASH di tempat kerja dan WASH.	<p>a. Identifikasi stakeholder terkait yang mendukung WASH di sekolah, WASH di fasilitas kesehatan, dan WASH di tempat kerja</p> <p>b. Identifikasi data dasar yang mendukung WASH di sekolah, WASH di fasilitas kesehatan, dan WASH di tempat kerja</p> <p>c. Framework atau kebijakan pendukung untuk WASH di sekolah, fasilitas kesehatan, tempat kerja, dan kebencanaan</p>	<p>1. Terinternalisasikannya target dan capaian WASH non rumah tangga (Sekolah, Fasilitas Kesehatan dan Tempat Kerja) dalam dokumen perencanaan dan penganggaran nasional (RPJMN dan Restra K/L)</p> <p>2. Adanya kebijakan nasional untuk WASH di Sekolah, Fasilitas Kesehatan, dan Tempat Kerja</p>
Sub-komitmen 4: Masterplan Nasional	-	Penyusunan masterplan air minum dan sanitasi nasional	Seluruh provinsi dan kab/kota memiliki masterplan air minum dan sanitasi aman yang diupdate secara berkala

#2



Memperkuat pemantauan dan pelaporan yang didorong oleh kesetaraan dan keterlibatan masyarakat

Sub-komitmen	Milestone (2022)	Target (2023)	Target 2030
Sub-komitmen 1: Satu platform pemantauan pencapaian SDG-6	Disahkannya Platform Database SDGs Tujuan 6 Target 6.1 dan 6.2 beserta pihak yang bertanggung jawab (focal point) untuk setiap penyediaan data indikator	a) Pengesahan dan pembaharuan data dasar indikator SDGs 6.1 dan 6.2 setiap tahun oleh pihak-pihak yang ditunjuk; b) Terinternalisasikannya aspek kesetaraan (gender, disabilitas, desil pendapatan, dll) dalam Indikator WASH	Tersedianya data berkala (time series) untuk indikator SDGs 6.1 dan 6.2 hingga tahun 2030 yang mempertimbangkan aspek kesetaraan dalam WASH
Sub-komitmen 2: Scale-up tools pemantauan untuk menilai akses air minum aman, sanitasi aman, dan hygiene	a. Terintegrasinya inspeksi sanitasi setempat dalam sistem monitoring STBM, surveilans kualitas air minum dan EHRA (environmental health risk assessment) di tingkat lokal (Kab/Kota) b. Website STBM berjalan optimal c. PAM-RT berjalan optimal d. Dimulainya surveilans kualitas air minum	Kerangka pemantauan dan pelaporan untuk air minum aman, sanitasi aman, dan hygiene	Terbentuknya platform pemantauan dan pelaporan yang terpantau secara rutin
Sub-komitmen 3: Mengembangkan tools pemantauan untuk menilai kualitas WASH non-rumah tangga	Optimalisasi Platform yang sudah tersedia yaitu Dashboard SDGs untuk integrasi tools pemantauan dan pelaporan sektor WASH non rumah tangga	Integrasi data dan dokumen yang sudah tersedia ke dalam Dashboard SDGs dan Platform lainnya yang berkaitan	Tersedia dan terintegrasinya data berkala dalam target dan capaian WASH non rumah tangga (Sekolah, Fasilitas Kesehatan dan Tempat Kerja)

Peran CSO

Peran CSO

#2



Memperkuat pemantauan dan pelaporan yang didorong oleh kesetaraan dan keterlibatan masyarakat

Sub-komitmen	Milestone (2022)	Target (2023)	Target 2030
Sub-komitmen 4: Adanya mekanisme pelaporan layanan publik untuk sektor WASH	1. Penyusunan pedoman bagi Pemda untuk memanfaatkan platform layanan publik eksisting untuk menampung masukan dan saran terkait layanan sektor WASH 2. Koordinasi dengan Kementerian PAN-RB untuk pengembangan mekanisme pelaporan layanan publik melalui SP4N Lapor!	1. Pedoman bagi Pemda untuk memanfaatkan dan mengembangkan platform layanan publik untuk sektor WASH (menggunakan SP4N Lapor!) 2. Pemanfaatan media siar dan/atau media elektronik milik Pemda untuk mendorong pelaporan layanan publik terkait dengan sektor WASH 3. 50% Pemerintah Daerah mulai menerapkan pelaporan layanan publik terkait dengan sektor WASH melalui SP4N Lapor!	1. Seluruh daerah memiliki mekanisme pelaporan untuk layanan public 2. Seluruh daerah menangani dan menindaklanjuti setiap pelaporan yang masuk terkait sektor WASH
Sub-komitmen 5: Terbentuknya civic engagement di seluruh lembaga layanan air minum dan air limbah domestik	a. Penyusunan pedoman pendirian dan kerangka penguatan forum pelanggan dan forum WASH b. Penyusunan mekanisme komunikasi forum pelanggan dan forum WASH c. Adanya forum WASH	a. Pedoman untuk pendirian dan kerangka penguatan forum pelanggan dan forum WASH sebagai mekanisme pelibatan masyarakat b. Mekanisme komunikasi forum pelanggan dan forum WASH c. Meningkatnya jumlah daerah yang memiliki forum pelanggan dan forum WASH sebagai mekanisme pelibatan masyarakat menjadi Kab/kota d. ...% daerah melaksanakan pilot project terhadap forum pelanggan dan forum WASH yang menerapkan kerangka penguatan forum pelanggan dan forum WASH	Seluruh daerah memiliki forum pelanggan WASH yang optimal dengan penerapan kerangka penguatan yang telah disusun

Peran CSO

Peran CSO

#3



Mengembangkan investasi dan infrastruktur sektor WASH yang berketahanan iklim

Sub-komitmen	Milestone (2022)	Target (2023)	Target 2030
Sub-komitmen 1: Penyusunan kerangka pedoman untuk mengarusutamakan sektor WASH ke dalam kebijakan dan peraturan terkait ketahanan iklim di tingkat nasional, provinsi, dan kab/kota	Tersusunnya pedoman untuk mengarusutamakan ketahanan iklim ke dalam kebijakan, rencana, dan investasi di tingkat nasional, provinsi, dan kab/kota	a. Terdapat kerangka kerja pengarusutamaan ketahanan iklim b. Dimulainya inisiasi untuk mengintegrasikan aspek ketahanan iklim dalam dokumen kajian dan perencanaan sektor WASH di provinsi dan kab/kota	a. 100% provinsi dan kab/kota telah mengintegrasikan pembangunan sektor WASH sebagai bagian dari dokumen kajian, kebijakan, perencanaan, dan investasi untuk ketahanan iklim
Sub-komitmen 2: Pencatatan dan Pemantauan Kontribusi sektor WASH terhadap adaptasi dan mitigasi nasional sebagai bagian dari Komitmen NDCs (Nationally Determined Contribution)	a. Adanya pilot WASH yang berketahanan iklim b. Teridentifikasinya kontribusi WASH pada NDC c. Teridentifikasinya daftar inisiatif pembangunan infrastruktur WASH berketahanan iklim, meliputi kontribusi terhadap pengurangan GRK, penghindaran kerugian karena bencana iklim, dan potensi pendanaan iklim, di tingkat nasional dan lokal	a) Terdapatnya kegiatan WASH yang berasal dari pendanaan dari upaya adaptasi dan mitigasi nasional; b) Adanya baseline untuk investasi pembangunan WASH berketahanan iklim; c) Terdapat indikator untuk memantau penurunan jejak karbon melalui pembangunan WASH d) Sistem pemantauan WASH terintegrasi dengan sistem pemantauan perubahan iklim (KLHK) e) Integrasi pendekatan, perencanaan dan program WASH dengan sektor perubahan iklim	b. Kontribusi sektor WASH dalam mengurangi jejak karbon dan emisi GRK dicatat dan dipantau sebagai bagian dari NDC Indonesia

#3



Mengembangkan investasi dan infrastruktur sektor WASH yang berketahanan iklim

Sub-komitmen	Milestone (2022)	Target (2023)	Target 2030	
Sub-komitmen 3: Pengembangan perilaku dan teknologi WASH yang ramah iklim	a. Tersusunnya pedoman program pengamanan air minum dan sanitasi yang berketahanan iklim	a. Studi untuk mendukung perilaku ramah iklim, termasuk hemat air	a. Seluruh penyelenggara SPAM mulai menerapkan teknologi pemanfaatan air yang ramah iklim b. Adanya pemecuan yang berkelanjutan kepada masyarakat mengenai perilaku pemanfaatan air yang ramah iklim, termasuk perilaku hemat air c. 100% PDAM telah menerapkan RPAM yang mengarusutamakan konsep berketahanan iklim	
	b. Dikembangkannya pedoman pengelolaan air minum dan air limbah di tingkat rumah tangga dengan berbasis prinsip ramah iklim	b. Teknologi pemanfaatan air yang ramah iklim		c. Perilaku pemanfaatan air yang ramah iklim
		d. Inventarisasi teknologi air minum dan sanitasi yang ramah iklim		d. Penerapan konsep RPAM di penyelenggara SPAM yang berketahanan iklim
	c. Perluasan pembangunan sumur resapan di tingkat rumah tangga	f. Pembangunan sumur resapan di tiap desa/kelurahan		e. Penerapan konsep RPAM di penyelenggara SPAM yang berketahanan iklim
				f. Pembangunan sumur resapan di tiap desa/kelurahan

Peran CSO

#4



Memperluas kemitraan dan memobilisasi pembiayaan alternatif untuk meningkatkan layanan WASH

Peran CSO

Peran CSO

Peran CSO

:: Draft komitmen masih dalam tahap pembahasan

Sub-komitmen	Milestone (2022)	Target (2023)	Target 2030
Sub-komitmen 1: Pemetaan keterlibatan sektor non-pemerintah dalam WASH	1. Inventarisasi lembaga non pemerintah di sektor WASH berdasarkan kelompok konstituen (CSO, lembaga riset, bisnis, filantropi, dll) 2. Teridentifikasinya berbagai jenis kemitraan di sektor WASH, termasuk WASH di institusi di tingkat Provinsi dan Kab/Kota	Seluruh pokja provinsi menjalin kemitraan dengan lembaga non pemerintah (CSO, lembaga riset, bisnis, filantropi, dll)	100% Provinsi telah mendapatkan dukungan pembangunan WASH dari berbagai kelompok konstituen non pemerintah
Sub-komitmen 2: Penguatan kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan di sektor WASH	Adanya komitmen bersama lembaga non pemerintah (CSO, lembaga riset, bisnis, filantropi, dll) untuk pembangunan WASH melalui Mekanisme Akuntabilitas Mutual (MAM)	Meningkatnya peran lembaga non pemerintah dalam pembangunan WASH di tingkat nasional dan daerah, baik dalam bantuan teknis maupun investasi (CSO, lembaga riset, bisnis, filantropi, dll)	
Sub-komitmen 3: Peningkatan pembiayaan alternatif untuk sektor WASH	1. Disusunnya kebijakan nasional tentang pembiayaan alternatif untuk air minum dan sanitasi (mikro kredit rumah tangga) 2. Model pilot untuk mikro kredit KPSPAMS	a) Disahkannya regulasi dan kebijakan khusus untuk MK rumah tangga b) Disahkannya regulasi dan kebijakan untuk MK KPSPAMS (merupakan bagian dari KUR) c) Adanya inisiasi kerja sama dengan LAZ Swasta d) Adanya Panduan CSR dan Filantropi e) Satu mekanisme pendanaan baru untuk air minum dan sanitasi (blended finance, sukuk, dana iklim)	



1

Mendukung pencapaian 3 komitmen MAM:

- Pengembangan mekanisme pemantauan dan pelaporan
- Pengembangan investasi dan infrastruktur
- Pengembangan kemitraan dan mobilisasi pembiayaan



2

Meningkatkan kesadaran masyarakat dan CSO lainnya tentang target SDG Tujuan 6 dan kebijakan pemerintah – dan mekanisme yang ada untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah dan pemda atas kemajuan pencapaian target.



3

Meningkatkan koordinasi terkait implementasi dan pemantauan kemajuan SDG Tujuan 6.



4

Menciptakan kemitraan yang lebih kuat antara CSO, akademisi, mitra pembangunan dan/atau media dan bertemu secara rutin.



5

Meningkatkan perhatian kepada kelompok akar rumput dan rentan untuk menyuarakan kebutuhan dan mendukung advokasi kepada pemerintah pusat dan daerah



TERIMA KASIH

Ministry of National Development Planning/
National Development Planning Agency

Jalan Taman Suropati No. 2, Jakarta 10310
021 3193 6207
bappenas.go.id



LANGKAH PENERAPAN MAM DI INDONESIA

Komitmen milik bersama yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan dan terdapat timeline yang jelas (*time-bound actions*)-**SMART**.

Perkembangan atas komitmen akan **dinilai dan didiskusikan secara berkala melalui proses *multi-stakeholder*** yang dipimpin oleh pemerintah atau pihak lain.

Pemerintah dan para pemangku kepentingan **berkolaborasi dalam menentukan komitmen MAM nasional**.



Selain itu, ketika komitmen tidak terpenuhi, **harus ada ruang untuk dapat mengidentifikasi tindakan perbaikan** dan penyesuaian yang diperlukan.

Proses **perencanaan dan review harus didokumentasikan** secara jelas dan dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan sektor.